



Pengaruh Pemberlakuan Program SPP Gratis 12 Tahun Terhadap Perekonomian Indonesia

Putri Balqis

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jeny Olivia Ivolina Purba

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dian Amelia Putri

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, PO. BOX 155, Tanjungpinang, 29111

Korespondensi penulis: pbalqis@student.umrah.ac.id

Abstract. *This research aims to find out the views of the public regarding the issue of the implementation of free 12-year tuition fees (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) from elementary, junior high, to high school levels in the Riau Islands. The sources of this research were obtained from students and university students located in Tanjungpinang. This type of research uses a qualitative approach. This research uses primary data. Primary data used in this study were obtained directly through distributing questionnaires to respondents. This study involved 32 people, including students and students in Tanjungpinang City. One of the factors that cause a weak educational foundation is the low level of income and the large population in Indonesia. Analyzing the quality of education is very important before schools receive assistance or mentoring, and this issue is not only related to money. It was found that communication between policymakers and implementers can change how programs are run.*

Keywords: *SPP, Education, Government, Poverty.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait isu pemberlakuan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) gratis 12 tahun dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kepulauan Riau. Sumber penelitian ini didapatkan dari para pelajar dan mahasiswa yang berlokasi di Tanjungpinang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Penelitian ini melibatkan 32 orang dimana diantaranya adalah mahasiswa dan pelajar di Kota Tanjungpinang. Salah satu faktor yang menyebabkan pondasi pendidikan yang lemah adalah rendahnya tingkat pendapatan dan banyaknya penduduk di Indonesia. Analisis kualitas pendidikan sangat penting sebelum sekolah menerima bantuan atau pendampingan, dan masalah ini tidak hanya berkaitan dengan uang. Ditemukan bahwa komunikasi antara pemberi kebijakan dan pelaksana dapat mengubah bagaimana program dijalankan.

Kata kunci: SPP, Pendidikan, Pemerintah, Kemiskinan.

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah hal yang penting bagi setiap Masyarakat dan merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu negara. Tanpa pendidikan, suatu negara dapat dengan mudah kehilangan arah dan tujuannya. Pendidikan juga menjadi kunci keberhasilan bangsa dengan menyediakan penduduk yang terdidik dan tenaga pendidik. Pendidikan adalah upaya terencana dan sadar untuk menyiapkan semua Masyarakat Indonesia, sehingga anak-anak produktif untuk sekolah. Bahkan kurangnya pendidikan menjadi salah satu faktor dari

kemiskinan. Indonesia pada tahun 2023 berpenduduk sekitar 278 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta jiwa (BPS, 2023).

Untuk mengatasi disparitas Pendidikan, pemerintah Indonesia membuat program wajib belajar, yaitu 6 tahun di Sekolah Dasar (SD), 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 3 tahun selanjutnya di Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya, pemerintah meningkatkan wajib belajar menjadi 12 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang wajib belajar, memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan jenjang program wajib belajar. Namun, tidak semua masyarakat mampu menempuh pendidikan selama 12 tahun tersebut dikarenakan salah satu kendala yaitu kemiskinan. Padahal dapat kita lihat bahwa anak-anak yang memiliki keterbatasan biaya tersebut memiliki semangat untuk belajar demi mencapai masa depan yang diinginkan. Hal ini menjadi penyebab anak-anak tersebut mudah putus asa dengan cita-citanya karena kendala yang dihadapi tersebut.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan berupa pemberian bantuan sosial yaitu uang tunai, sembako, ataupun dana sebagai modal usaha. Selain itu, Upaya tambahan mencakup penyediaan fasilitas dan sarana untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat. Namun, upaya pemerintah ini sering menimbulkan efek negative, seperti budaya malas bekerja karena bergantung pada bantuan pemerintah. Bahkan bantuan yang diberikan seringkali tidak tepat sasaran, seperti masyarakat yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat yang mampu bekerja malah mendapatkan bantuan, yang berarti anggaran terbuang sia-sia. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih teliti memilih masyarakat yang memerlukan bantuan sosial dan masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi agar tidak terdapat bantuan yang salah sasaran lagi.

Kemiskinan menyebabkan terhambatnya pendidikan dalam suatu negara. Pendidikan bukan hanya belajar di sekolah namun belajar juga bisa dilakukan dimana saja mulai dari di rumah, di tempat bermain, ataupun di tempat lainnya yang memadai. Pengertian belajar menurut Illeris (2009, p. 88) *“learning is, however, not the same as transformation and change of conduct, because learning may result in a better understanding of a phenomenon, which cannot necessarily be observed as changed conduct”*. Sedangkan menurut Fry, Ketteridge, & Marshall (2008, p. 8) menambahkan bahwa *“learning is not a single thing; it may involve mastering abstract principles, understanding proofs, remembering factual information, acquiring methods, techniques and approaches, recognition, reasoning, debating ideas, or developing behaviour appropriate to specific situations; it is about change.”* Ini menunjukkan bahwa belajar dapat mencakup banyak hal, seperti menguasai prinsip-prinsip abstrak,

memahami bukti, mengingat informasi faktual, memperoleh metode, Teknik, penalaran, mengakui, berdebat tentang gagasan, atau mengembangkan perilaku yang sesuai dalam situasi tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib belajar, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.” Pemerintah setiap negara menetapkan program Pendidikan yang disebut sebagai wajib belajar. Di Kepulauan Riau, isu pemberlakuan SPP untuk semua jenjang menjadi isu yang diperbincangkan akhir-akhir ini. Hal ini merupakan berita baik bagi Masyarakat yang memiliki kesulitan mendapatkan program Pendidikan. Program ini akan memungkinkan Pendidikan di Indonesia untuk lebih maju dan berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode ini mencakup penjelasan sistematis dan rasional dari metodologi penelitian kualitatif. Studi ini dilakukan di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penelitian dilakukan selama satu bulan, tepatnya pada bulan Mei 2024. Subjek penelitian adalah siswa dan mahasiswa. Data penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner pendapat serta opsi pilihan pelajar dan mahasiswa terhadap isu pemberlakuan SPP gratis 12 tahun. Pertanyaan berisi (a) pengetahuan audiensi tentang pemberlakuan isu tersebut di Kepulauan Riau; (b) pengaruh isu tersebut terhadap ekonomi keluarga; (c) pengaruh isu tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang; dan (d) pengaruh isu tersebut terhadap angka kemiskinan di masa yang akan datang. Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa serta pelajar. Padahal kebijakan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu di seluruh daerah pulau Jawa dan seharusnya sudah diterapkan dan bukan hanya isu belaka. Pada kenyataannya ada beberapa sekolah menengah atas yang sudah menerapkan kebijakan tersebut namun belum dilakukan secara terang-terangan. Upaya pemberlakuan kebijakan ini secara merata masih harus dipantau terus perkembangannya. Diharapkan kebijakan ini dapat segera dilakukan secara merata khususnya pada sekolah menengah atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari pemberlakuan SPP gratis 12 tahun di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau meliputi pendapat dari para pelajar yang menempuh pendidikannya di Tanjungpinang. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menjelaskan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu berupa biaya penyelenggaraan meliputi: biaya investasi (penyediaan sarana dan prasarana), biaya operasional (gaji pendidik dan tenaga pendidik serta pemeliharaan), dan bantuan biaya pendidikan pemerintahan (siswa kurang mampu dan siswa berprestasi). Menurut data kuesioner yang kami sebar, mayoritas menyetujui adanya program ini karena bantuan ini dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang dialami oleh siswa dan orangtua, sehingga mereka bisa mengalokasikan kebutuhan yang lebih besar dan penting lebih dahulu, seperti membeli buku dan alat pendidikan yang lebih memadai. Dengan begitu, bantuan ini dapat meningkatkan cara belajar siswa sehingga lebih optimal dalam mengembangkan potensi mereka.

Bantuan ini juga dapat mendongkrak pendidikan di Indonesia karena semua anak bisa mendapat pendidikan yang layak dan membuka kesempatan bagi banyak siswa untuk dapat duduk di bangku perkuliahan, karena dengan adanya bantuan ini maka dana pendidikan yang telah dipersiapkan untuk Pendidikan SMA dapat dialokasikan untuk biaya Pendidikan di jenjang selanjutnya. Jika kita melihat banyak anak-anak yang berprestasi namun terkendala dalam pendidikannya oleh biaya yang dirasa terlalu tinggi bagi mereka. Walaupun SPP gratis ini sudah diberlakukan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama faktanya untuk melanjutkan ke jenjang Atas perlu biaya setiap bulannya yang dipungut oleh sekolah, hal ini menyebabkan beberapa anak-anak hanya sanggup melanjutkan sampai dibangku SMP saja. Biaya yang diperlukan juga bukan hanya iuran tiap bulan namun juga biaya pendaftaran dan biaya untuk seragam mereka.

Kami mendapati bahwa dalam kuesioner yang kami sebar 100% audiensi setuju bahwa pemberlakuan SPP gratis 12 tahun ini dapat sangat membantu perekonomian untuk keluarga yang dirasa kurang mampu terutama untuk keluarga yang memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah. Mayoritas jawaban audiensi pada kuesioner tersebut sependapat bahwa jika isu ini segera diberlakukan maka pendidikan di Indonesia akan segera merata dan mengurangi jumlah angka pengangguran di masa depan serta meningkatkan kreativitas para siswa sedini mungkin sebagai bekal mereka di dunia kerja. Hal ini juga akan berpengaruh untuk meningkatkan UMKM di masa yang akan datang. Kami juga membuka masukan dan kritik pada kuesioner mengenai isu ini. 50% dari audiensi kami adalah seorang mahasiswa sehingga

mereka sangat mengharapkan bilamana isu tersebut berlaku di kalangan SMA maka dapat ditingkatkan ke jenjang Pendidikan tertinggi yaitu bangku perkuliahan.

Mayoritas penduduk di Kepulauan Riau bekerja di sektor perikanan seperti nelayan, sehingga anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya yang tinggi. Oleh karena itu, program SPP gratis ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sehingga peran pemerintah ini lah yang sangat ditunggu-tunggu manfaatnya untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di masa yang akan datang. Pemerintah harus segera merapikan pemberlakuan kebijakan ini, bantuan ini bisa menjadi langkah positif dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Namun, efektivitas program ini berjalan tergantung bagaimana dana dikelola dan dialokasikan. Diharapkan pengelolaan dana yang efektif dan tepat sasaran akan memungkinkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri di masa depan.

Bantuan ini dapat mengurangi jumlah SDM rendah di Indonesia dan dapat mengatasi masalah banyaknya pengangguran karena kurangnya pendidikan yang memungkinkan dapat mengurangi angka kemiskinan, pastinya membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil analisis deskriptif yang dilakukan menunjukkan bahwa masalah ini sangat diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin karena akan memiliki dampak yang sangat baik terhadap perekonomian dan Pendidikan di Kepulauan Riau. Memang benar adanya bahwa isu tersebut sudah direalisasikan di daerah sekitaran pulau Jawa, Kepulauan Riau akan segera menerapkan pemberlakuan isu tersebut sesegera mungkin. Dengan pemberlakuan isu tersebut diharapkan dapat meningkatkan SDM di daerah Kepulauan Riau serta mengurangi angka pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Diharapkan pula dengan meningkatnya sumber daya manusia maka angka perekonomian di Kepulauan Riau dapat menunjukkan perubahan yang signifikan demi memajukan perekonomian daerah.

2. Saran

Pemberlakuan program SPP gratis 12 tahun ini perlu dipantau lebih lanjut oleh pihak pemerintah pusat dan kementerian pendidikan agar pemberlakuan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran tanpa menjurus ke pihak lain yang tidak berwenang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Universitas Maritim Raja Ali Haji
2. Ibu dosen Wahjoe Pangestoeti S.Sos, M.Si
3. Audiensi yang sudah mengisi kuesioner.

DAFTAR REFERENSI

- Herawan, N. S., Putri, S. D., Julianti, S., & Ariesmansyah, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 324-333. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7816433>
- Luyani, U., Mansyur, A., & Soraya, N. (2022). Dampak Penghapusan Kebijakan Program Sekolah Gratis Terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 4(3), 207-226. <https://doi.org/10.19109/pairf.v4i3.7762>
- Margiyanti, L., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan dan Sastra Inggris*, 3(1), 199-208. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>
- Purnama, J. D., Subaheri, & Desmawan, D. (2022). Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 71-77. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.53>
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal On Education*, 5(3), 9441-9450. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>
- Supriadi, D., Alim, A., & Rosyadi, A. R. (2021). Wajib Belajar Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1-20. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i001.1720>
- Syamsuddin, Hermansyah, & Sani, K. R. (2022). Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Program Seragam Sekolah Gratis di Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik*, 12(1), 45-52. <https://doi.org/10.47030/aq.v12i1.121>
- Wahyudi, S. (2021). Peranan Dna Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dlam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTS NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 32-52. Retrieved from <https://www.ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/119>
- Wahyuni, A. T., Puspitasari, I., Saidah, L., Putra, A. P., & Agustin, E. (2023). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Melalui Seminar Pendidikan di Desa Jayasari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 446-453. Retrieved from <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/86>

Widiyana, D., Siswoyo, M., & Nurfalah, F. (2020). Pengaruh Sosialisasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 8(1), 42-52. <https://dx.doi.org/10.33603/publika.v8i1.4170>.